



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIRO ORGANISASI

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun sebagai bentuk *self assessment* atas kinerja organisasi dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja. Kinerja, Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja ini juga merupakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait mengenai Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah, serta capaiannya dalam Tahun Anggaran 2025, sehingga diperoleh umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala upaya dalam mewujudkan capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, serta pegabihan kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Palu, 20 Februari 2026

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG



NENG ELLY, SH, MM

Pembina Utama Muda

Nip.19730601 199503 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 GAMBARAN UMUM.....	6
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
1.3 ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN.....	13
1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	17
2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	19
2.4 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 CAPAIAN KINERJA	25
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini.....	25
b. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	28
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	31
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ Daerah Lain jika ada).....	33
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	35

f. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	45
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	50
3.3 INOVASI.....	53
3.4 PENGHARGAAN.....	53
BAB IV PENUTUP.....	54
LAMPIRAN.....	56
Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2025	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban praktek kepemimpinan yang baik (*Good Governance*), Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan local. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, pencapaian sasaran dalam Tahun 2025. Laporan kinerja ini sebagai Pertanggungjawaban Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas selama Tahun 2025.

Tugas Biro Organisasi meliputi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan serta Kinerja dan Pelayanan Publik. Untuk pencapaian target. Biro Organisasi mendapatkan alokasi anggaran pagu awal Rp. 1.619.442.500,-. Alokasi tersebut menurun dari total pagu tahun sebelumnya dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran Biro Organisasi sampai dengan perubahan akhir dokumen anggaran bertambah menjadi Rp. 2.154.442.484,-. Alokasi dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk peningkatan program penataan organisasi hal tersebut didukung dengan perwujudan 5 (Lima) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Sasaran pendukung yang di implementasikan dalam dua Program, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Penataan Organisasi.

Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, penyerapan anggaran Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng menunjukkan hasil yang baik yaitu 97%, dengan penyerapan yang sama dari tahun sebelumnya sebesar 97%, pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng baik pihak internal maupun eksternal. Laporan Kinerja Biro Organisasi tahun 2025 menyajikan capaian dari pelaksanaan 2 Program, 8

Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan menggunakan Anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian yang ditargetkan pada tahun 2025 sebagian besar terlaksana 100% terhadap ketetapan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja maupun target yang ada direncana STRATEGIS (Renstra) Sekretariat Daerah Prov. Sulteng. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap memacu pelaksanaan pekerjaan agar terlaksana lebih efisien dan lebih efektif untuk tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai target. Mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Organisasi juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi penekanan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Biro Organisasi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi selama satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan.

Biro Organisasi memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui penataan organisasi, ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas kelembagaan dan proses bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan pimpinan instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi pencapaian target kinerja, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah tercapai.
2. Melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan Pertanggungjawaban Keuangan.

3. Sebagai bahan Informasi, Evaluasi dan Dokumentasi referensi dalam perencanaan serta pelaporan pada periode berikutnya.

Dukungan SDM , Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Dukungan yang dimiliki Biro Organisasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Jabatan/ Eselon/JFU

Jabatan	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
Eselon II	0	1	1
Eselon III	0	3	3
Eselon IV	2	5	7
Pelaksana	10	7	17
PPPK	10	17	27
PPPK PW	1	2	3
Fungsional	4	1	5
Total	28	35	63

- b. Kepangkatan Pegawai pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Golongan/Kepangkatan	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
II/a	-	-	-
II/b	1	-	1
II/c	-	-	1
II/d	2	1	3
III/a	1	1	2
III/b	3	3	6
III/c	5	-	5
III/d	3	7	10
IV/a	1	2	3
IV/b	-	2	2
IV/c	-	1	1
Total	16	17	33

- c. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
SLTA/Sederajat	5	3	8
D3	-	0	0
S1	18	26	44
S2	4	6	10
S3	-	1	1
Total	27	36	63

- d. Dukungan Sarana Prasarana

No Urut	Nama Barang/Jenis	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4	Fortune, Rush, Avanza	4 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2	Honda, Yamaha, Suzuki	18 Unit	Baik
3	Komputer	Lenovo, Lg, Benq, Acer, HP, Asus	33 Unit	Baik
4	Laptop	Lenovo, Toshiba, Acer, Asus	28 Unit	Baik
5	LCD/in focus	Benq, Epson	3 Unit	Baik
6	Printer	Epson, Canon, HP Laserjet	11 Unit	Baik
7	AC	Gree, Panasonic, Sharp	16 Unit	Baik
8	Tab/Keybord	Samsung Galaxy	5 Unit	Baik
9	Kamera	Tenveo	1 Unit	Baik
10	TV Led	LG	2 Unit	Baik
11	Kamera	Canon EOS	1 Unit	Baik
12	Gimbal Camera	Gimbal	1 Unit	Baik
13	Ruangan / Paket Podcast	Podcast	1 Paket/ 1 Unit	Baik
14	Vidio liht	Godox LEDP 120C	1 Unit	Baik

15	Tabung Pemadam	Garra	1 unit	Baik
16	Papan Tulis	Triplek	1 unit	Baik
17	Brankas	Maestro	1 unit	Baik
18	Mesin ID Card	Zenius	1 Unit	Baik
19	Scanner	Kodak	4 Unit	Baik
20	Speker Aktif	Metal	1 Unit	Baik
21	Proyektor	Benq	3 Unit	Baik
22	Filing Kabinet	Brother	8 Unit	Baik
23	Lemari Arsip	Besi dan Kayu, 3 Pintu,	19 Unit	Baik
24	Kursi Tamu	Besi	2 unit	Baik
25	Kursi Tamu	Jati	1 Unit	Baik
26	Bupet	Jati	1 Buah	Baik
27	Dispenser	Miyako	3 Unit	Baik
28	Kursi lipat	Chitose/Hindaji	40 buah	Baik
29	Kursi Putar Sandaran	Besi/bus	11 Buah	Baik
30	Kursi Tamu Eselon II	Kayu	1 Buah	Baik
31	Kursi Pejabat	Indachi, Fontline	13 Buah	Baik
32	Meja Kerja	Jati	1 Paket	Baik
33	Meja Front Office	HPL	1 Set	Baik
34	Meja Staf	Kayu	28 buah	Baik
35	Meja Kerja Pejabat	Kayu	13 Buah	Baik

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dan kompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan Publik.

Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- c. Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- d. Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk menjalankan fungsinya dibantu oleh bagian yaitu :

1. Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, supervisi, bimbingan teknis, memfasilitasi, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah. Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi, kelembagaan Perangkat daerah Kabupaten/kota, dan Reformasi Birokrasi;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis bidang kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Penyiapan bahan-bahan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Reformasi Birokrasi;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, memfasilitasi, melakukan supervise, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Analisa dan Formasi Jabatan, evaluasi jabatan dan kompetensi jabatan, tata usaha. Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Analisa dan Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan serta Tata Usaha;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Analisa dan Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan serta Tata Usaha;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Analisa dan Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan serta Tata Usaha;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Analisa dan Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan serta Tata Usaha;
 - e. Penyiapan bahan ketatausahaan dan pelayanan administrasi Biro Organisasi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas penyiapan bahan merumuskan dan melaksanakan supervise, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana, Budaya Kerja, dan Pelayanan Publik. Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

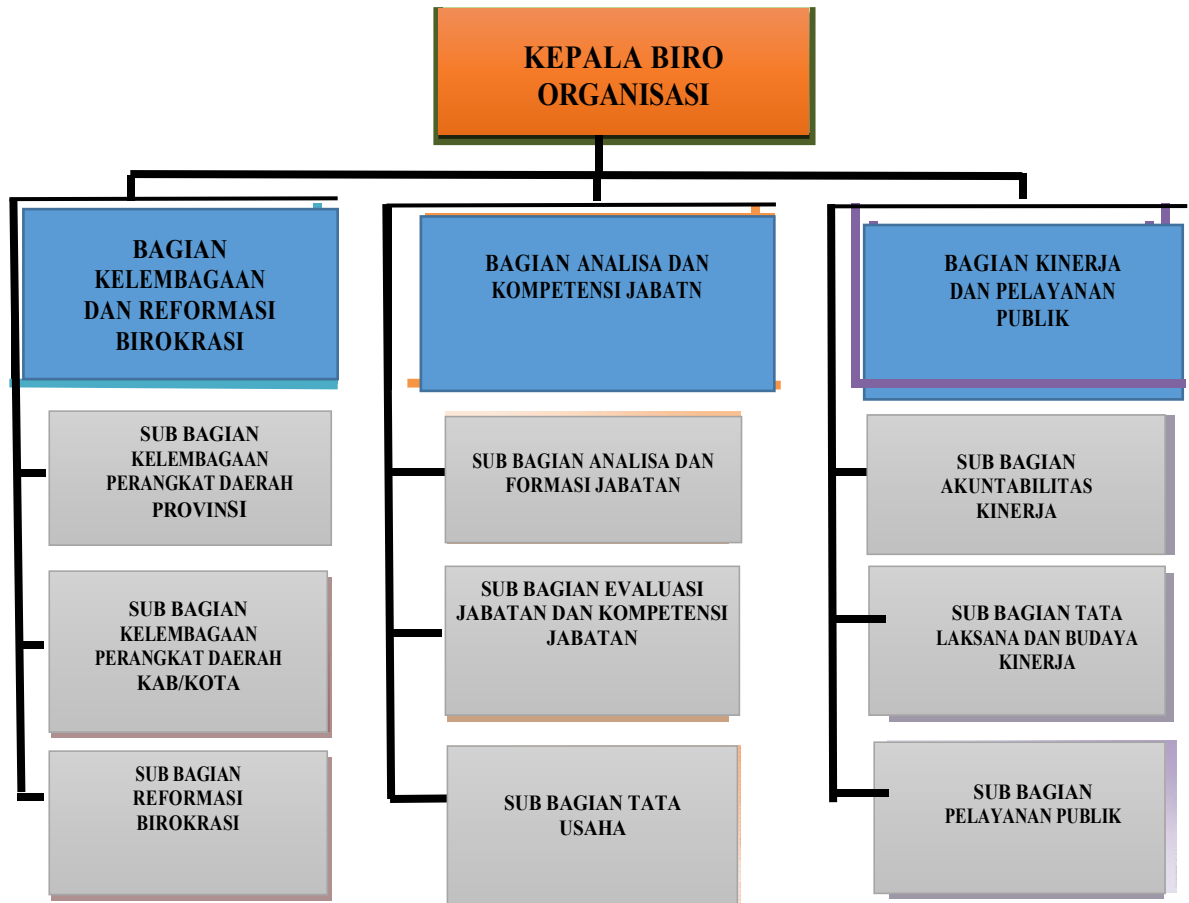
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Budaya Kinerja dan Pelayanan Publik;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Budaya Kinerja dan Pelayanan Publik;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Budaya Kinerja dan Pelayanan Publik;
- d. Penyiapan bahan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan budaya kinerja, dan pelayanan publik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro, untuk dapat menjalankan tugasnya dibantu 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian. Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, membawahi :
 - a. Kasub. Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.
 - b. Kasub. Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Kasub. Bagian Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan, membawahi :
 - a. Kasub. Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.
 - b. Kasub. Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan.
 - c. Kasub. Bagian Tata Usaha
4. Kepala Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik, membawahi :
 - a. Kasub. Bagian Akuntabilitas Kinerja.

- b. Kasub. Bagian Tatalaksana dan Budaya Kerja.
- c. Kasub. Bagian Pelayan Publik.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



1.3 Isu-Isu Strategis

1. Peningkatan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Terwujudnya Penataan Sumber Daya Manusia.
3. Terwujudnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
4. Terwujudnya Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Terwujudnya Sistem Kerja Baru, Penerapan Budaya Kerja dan Ketatalaksanaan
6. Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Biro Organisasi

1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun dalam hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : 700.1.2.1/026/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 tanggal 11 April 2025, terdapat 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/kinerja Organisasi. Biro Organisasi memperoleh nilai sebesar **83,70**, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk dalam kategori **A (nilai >80-90)**, dengan interpretasi Memuaskan dimana terdapat gambaran bahwa instansi biro organisasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah sampai pada level eselon 4/pengawas/subkoordinator, Akuntabel, Berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal. Dalam hal ini laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Format Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut	Link data tindak lanjut
1.	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi secara berkalaMelakukan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi secara berkala.	Dalam melaksanakan rencana aksi kedepanya akan dilakukan pegendalian dan langkah-langkah strategis	https://drive.google.com/drive/folders/1T28VJWEuBLmG3uvu8RynCgVahs-Z1ACs?usp=drive_link
2.	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	sudah ada pedoman teknis Akuntabilitas Kinerja sementara proses proses SOP pengumpulan Data Kinerja Tahun 2025	
3.	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang	akan melaksanakan pemantauan atas pengkuran capaian kinerja secara berjenjang	
4.	Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	Pengukuran Kinerja sudah di Susun per triwulan dapat dilihat di Rencana Aksi dan dapat dilihat di Aplikasi Sepkip (Sistem Evaluasi Perjanjian Kinerja) untuk tahun 2024 dapat dilihat diaplikasi SALIARA dan WebSaib Biro Organisasi	
5.	Memastikan adanya diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis	Pertama memastikan adanya kejelasan mengenai tujuan dan sasaran dari keputusan tersebut. Kedua, perlu dokumentasi yang jelas mengenai hasil diskusi, poin-poin kesepakatan, dan rencana aksi yang akan diambil. Ketiga, penunjukan penanggung jawab untuk setiap langkah tindak lanjut guna memastikan akuntabilitas. Keempat, jadwal implementasi yang terstruktur . Terakhir, evaluasi berkala untuk mengukur realisasi kinerja rencana aksi efektivitas keputusan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan	

6.	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat berita acara hasil tindak lanjut hasil rekomendasi LHE APIP yang sesuai Peraturan perundangan yang berlaku	akan segera ditindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal membuat berita acara LHE APIP	
----	---	---	--

Selain Tindak Lanjut tersebut, Biro Organisasi juga terus melakukan upaya perbaikan dengan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja, Penguatan Evaluasi Kinerja Internal, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Secara keseluruhan, tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah dan akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan Kualitas implementasi SAKIP serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang lebih Efektif, Efisien dan Berorientasi hasil pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sesuai VISI Gubernur Sulawesi Tengah “**Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029**” Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Adapun Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas pada Program Biro Organisasi dalam Rencana Aksi yang merupakan Sasaran Strategis dalam Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diturunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan Perumusan Tujuan dan Sasaran dan Indikator adalah upaya untuk mencapai visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.

SASARAN :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Penerapan Hasil pembinaan Pelayanan Publik.
3. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda.
4. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General.
5. Meningkatnya penerapan budaya kerja pada perangkat daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi.

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Kematangan Organisasi
2. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah.
4. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
5. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai RB Minimal "B"
6. Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi

2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan Strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi. Dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta pagu pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan terkait pencapaian sasaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
1.	PENATAAN ORGANISASI	672.971.050	1.008.055.434	335.084.384
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	331.282.100	421.664.100	90.382.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	86.396.950	98.584.800	12.187.850
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota	87.918.300	107.918.300	20.000.000
	Penataan Analisis Jabatan	156.966.850	215.161.000	68.772.150
2.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	341.688.950	586.391.334	244.702.384
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	87.758.150	143.479.900	55.721.750
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80.079.050	94.559.934	14.480.884
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	22.520.200	22.519.900	(300)
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	62.473.550	135.473.700	73.000.150
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	88.858.000	190.357.900	101.499.900

Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	946.471.450	1.146.387.050	199.915.600
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.886.000	49.787.650	28.901.650
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	20.886.000	49.787.650	28.901.650
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	410.490.000	368.560.000	(41.930.000)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.490.000	368.560.000	(41.930.000)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.795.000	4.750.000	(45.000)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4.795.000	4.750.000	(45.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.622.000	375.089.950	120.467.950
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.168.050	107.728.400	29.560.350
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.887.950	24.089.550	12.201.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.566.000	243.272.000	78.706.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.673.450	13.673.450	0
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	13.673.450	13.673.450	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.005.000	334.526.000	92.521.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.115.000	301.716.000	87.601.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.890.000	32.810.000	4.920.000

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka memujudkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Tahun 2021-2026
Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan	1) Nilai Pelaporan Kinerja	Penjelasan Hasil Evaluasi Kementerian PAN & RB Terhadap Kualitas Laporan Kinerja Pemda dan Perangkat Daerah Formulasi hasil LHE KEMENPAN&RB	Hasil LHE KEMENPAN & RB	Bagian Kinerja dan Pelayanan Publi
		1) Nilai Kelembagaan Dimensi Struktur	Penjelasan Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot masing-masing subdimensi sebagai berikut 1) Dimensi Kompleksitas adalah 50% (lima puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 25% (dua puluh lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor 2) Dimensi Formalisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor. 3) Dimensi Sentralisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor. Formulasi Dimensi (Struktur organisasi 50% Bobot dari nilai Dimensi (Kompleksitas Struktur (50%), Formalisasi Struktur (25%), Sentralisasi Strukur (25%) Bobot dari Nilai Total Keseluruhan (Kompleksitas Struktur (25%), Formalisasi Struktur (12,5%) Sentralisasi Struktur (12,5 %)	Permenpan	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi dan Bagian Analisa Dan Kompetensi Jabatan

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

	2) Indeks Kematangan Organisasi	Penjelasan Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Formulasi Akumulasi Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
	4) Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Penjelasan Hasil Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah Formulasi $\frac{\Sigma \text{Jumlah PD yang telah menerapkan Sistem Kerja Baru}}{\Sigma \text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Hasil LHE KEMENPAN & RB	Bagian Kinerja & Pelayanan Publik
	5) Indeks Ber-Akhlak Pemda	Penjelasan Hasil Evaluasi KEMENPAN&RB terhadap imlementasi/pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja BerAHLAK di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Formulasi Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	Data Quisioner Kemenpan RB	Bagian Kinerja & Pelayanan Publik
	6) Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B	Penjelasan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Formulasi $\frac{\Sigma \text{Jumlah PD Nilai RB B}}{\Sigma \text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Hasil data LHE Inspektorat dan Biro Organisasi	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
	7) Indeks Pelayanan Publik	Penjelasan Hasil Evaluasi Kementerian PAN & RB terhadap Pelayanan Publik untuk lotus evaluasi Formulasi Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	Hasil LHE KEMENPAN & RB	Bagian Kinerja & Pelayanan Publik
	8) Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah daerah	Penjelasan dihitung dari Akumulasi hasil evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayan publik pada PD lokus dengan zona hijau Formulasi Hasil Evaluasi OM Budsman	Hasil Evaluasi OM Budsman	Bagian Kinerja & Pelayanan Publik
	9) Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Penjelasan Hasil data dan Informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Formulasi Hasil Pengelolaan Data SKM Biro organisasi	Hasil data SKM Biro Organisasi	Bagian Analisa dan Formasi Jabatan

Tabel. 2.4
Tujuan, Sasaran Dan Indikotor Kinerja Jangka Perubahan Tahun 2026 - 2030
Menengah Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	1)Indek Kematangan Oganisasi	Penjelasan Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permendangri No. 99 Tahun 2018 pembinaan dan Pegendalian Penataan Perangkat Daerah Formulasi Akumulasi Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	2) Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah daerah	Penjelasan dihitung dari Akumulasi hasil evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayan publik pada PD lokus dengan zona hijau Formulasi Hasil Evaluasi OM Budsman	Hasil Evaluasi OM Budsman	Bagian Kinerja &Pelayanan Publik
		3) Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Penjelasan IKM Pemerintah Daerah adalah,ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik, diukur dengan survei berbasis skala Likert (1-4), membandingkan harapan dan kenyataan; formulanya mengacu pada nilai rata-rata dari 9 unsur pelayanan (persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, perilaku, sarpras, pengaduan) yang dijumlahkan dan dirata-ratakan, lalu dikonversi menjadi nilai IKM untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan layanan secara berkala Formulasi Hasil Data IKM Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Bagian Kinerja &Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	4) Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Penjelasan Hasil Evaluasi KEMENPAN&RB terhadap imlementasi/pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja BerAHLAK di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Formulasi Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	Data Quisioner Kemenpan RB	Bagian Kinerja &Pelayanan Publik
4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	5) Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B	Penjelasan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Formulasi $\Sigma \text{ Jumlah PD Nilai RB B X } 100\%$ $\Sigma \text{ Jumlah Perangkat Daerah}$	Hasil data LHE Inspektorat dan Biro Organisasi	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
5	Meningkatnya Penerpan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	6) Indeks Ber-Akhlak Pemda	Penjelasan Hasil Evaluasi KEMENPAN&RB terhadap imlementasi/pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja BerAHLAK di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Formulasi Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	Data Quisioner Kemenpan RB	Bagian Kinerja &Pelayanan Publik

6	Meningkatnya Kinerja Pegawai, Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan	7) Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Penjelasan Hasil data dan Informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	Hasil data SKM Biro Organisasi	Bagian Analisa dan Formasi Jabatan
---	---	---	---	--------------------------------	------------------------------------

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan atas pencapaian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja juga merupakan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Biro Organisasi

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13.05 Indeks
2.	Terwujudnya Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah yang Proporsional	100 Persentase
		Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	36 Indeks
		Nilai Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Daerah	78 Nilai
3.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Kerja Baru	100 Persentase
4.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	76 Indeks
5.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal "B"	70 Persentase
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	4,1 Indeks
7.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	98 Nilai
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	89 Indeks

Tabel. 2.4.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Organisasi

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	37,97 Indeks
2.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	54 Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	83.50 Indeks
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13.02 Indeks
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal “B”	20 Persentase
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	68 Indeks
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	89 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, penyajian akuntabilitas kinerja ini dilakukan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun serta Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada dokumen perjanjian kinerja, kinerja organisasi diukur melalui indikator kinerja pada Biro Organisasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 6 (Enam) indikator target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini

Tabel 3.1.a
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	37,97	37,97	100
2.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	54	87,95	162

		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	83.50	85.02	01
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13,02	11.53	88,55
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal “B”	20	22.5	112.5
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	68	67.10	98
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	89	90	101

1. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Permenpan nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah memperoleh nilai komposit dengan hasil skor 77,43 dari yang ditargetkan sebesar 78 dengan capaian kinerja 98,71%. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi standar dan proses organisasi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tergolong efektif, struktur dan proses organisasi yang ada mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan eksternal organisasi.

Untuk evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah NILAI INDEKS Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masih menggunakan nilai pada tahun 2024 yakni ; 37,97 Tingkat Kematangan Tinggi. Salah satu faktor yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan Evaluasi Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota adalah partisipatif aktif dan kualitas dokumen yang disajikan sebagai data dukung pada Pemerintah Daerah. Pemahaman mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi guna meningkatkan kualitas dalam hal kematangan Organisasi pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dengan Realisasi 19,88 sebesar 52%.

2. Capaian hasil evaluasi atas maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun berjalan menunjukkan penurunan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya dimana indeks kepatuhan

penilaian malaadministrasi pelayanan publik tahun 2024 diangka 97.17 Zona hijau dengan kategori A kualitas tertinggi yang terdiri dari 5 PD lokus evaluasi yakni Dinas pendidikan, DPMPTSP, Dinas Dukcapil, RSUD Undata dan Dinas Sosial dimana Sulteng berada diposisi ke 6 nasional dari 34 provinsi diindonesia. Sementara pada tahun 2025 diangka 87.95 yang terdiri dari RSUD undata, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dengan sulteng yang berada pada posisi ke 5 dari 34 provinsi diindonesia. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kualitas pelayanan, melainkan berkurangnya jumlah lokus evaluasi yang menjadi objek penilaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga terdapat Instrumen Baru dalam penilaian ditahun 2025.

3. Dengan demikian, penurunan realisasi secara total perlu dipahami sebagai dampak dari aspek kuantitatif (jumlah lokus), sementara dari sisi kualitatif, pelaksanaan pelayanan publik menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan dan penguatan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil positif pada unit layanan yang dievaluasi. Untuk capaian IKM pemda Sulteng dengan angka 85.02 ditahun 2026 yang implementasinya terdiri dari 50 PD, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada diangka 82.65 ditahun 2025 yang implementasinya terdiri dari 49 Perangkat Daerah.
4. Capaian SAKIP Pemda Prov. Sulteng komponen pelaporan kinerja Tahun 2025 masih menunggu rilis dari Kemenpanrb yang di rencanakan akan di umumkan pada tanggal 11 Februari Tahun 2026. Untuk sementara menggunakan realisasi Tahun 2024, Dimana capaian nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja Tahun 2024 sebesar 88,55 % dari target yang ditetapkan sebesar 13,02 Poin dan realisasi sebesar 11,53 poin.
5. Target kinerja untuk indikator perangkat daerah dengan nilai RB minimal “B” Tahun 2025 didasarkan pada dokumen perencanaan strategis Biro Organisasi yaitu sebesar 20%. Adapun realisasinya adalah sebesar 22,5% dimana dari 40 perangkat daerah yang dinilai, terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah mencapai nilai RB dengan kategori BB dan 7 (tujuh) Perangkat Daerah mencapai nilai RB dengan kategori B yang berdasarkan penilaian pada aplikasi SURABE BERANI

(Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator ini melebihi target yang telah ditentukan dengan nilai capaian kinerja sebesar 112,5%. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah dalam hal pengisian dokumen/data dukung yang dibutuhkan untuk penilaian, kolaborasi dan koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah Pengampuh Indikator RB Perangkat Daerah sebagai evaluator dan Tim Sekretariat RB pada Biro Organisasi. Pelaksanaan komitmen dari para *stakeholder* yang terlibat terlaksana dengan baik, hal ini merupakan wujud dari implementasi pembagian peran yang termuat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025 tentang Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah dinilai sudah berjalan dengan baik dan memudahkan perangkat daerah jika terdapat kendala atas pengisian LKE RB pada aplikasi SURABE BERANI.

6. Di Tahun 2025 MENPAN RB tidak melakukan penilaian pada PEMDA terkait Survei Indeks BerAKHLAK, sehingga untuk nilai ditahun 2025 masih menggunakan nilai di Tahun 2024.
7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 mengalami peningkatan 1,46 poin dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, Biro Organisasi meraih nilai 90 sedangkan pada tahun 2024 memperoleh nilai 89,54.

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.b
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	30	27.03	90	35	32.05	91	37.97	32.05	84
2.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	80	81.37	101.71	88	96.17	109.28	54	87.95	162

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025

		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	80	85.54	106,92	88,50	82,65	93,38	83,50	85,02	101
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	12	11,45	95	13	11,53	88	13	11,53	88
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal "B"	0	0	0	20	22.5	122	20	22.5	122
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	75	58.1	77	68	67.10	98	68	67.10	98
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	80	90.08	112	88.50	89.54	101	89	90	101

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja evaluasi kelembagaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 3 tahun berturut-turut menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2022 target 72 dan realisasi 72 serta capaian kinerja 100%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2023 dengan target 75 dan realisasi 75 capaian kinerja 100%. Peningkatan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 dengan target 78 dan realisasi 77 capaian kinerja 98,71%. Dengan selisih 1 poin dari target, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target namun angka tersebut masih mencerminkan kinerja yang baik. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan Tahun 2024 kinerja lembaga secara keseluruhan tetap menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan capaian yang hampir selalu mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga, serta kemampuan untuk terus meningkat.

Telah dilaksanakan upaya dalam rangka Pembinaan guna mendorong pelaksanaan ketatalaksanaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Sulawesi Tengah. Nilai yang dihasilkan semuanya berdasarkan data-data yang dihimpun searah pelaksanaan evaluasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengoordinasian yang baik pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten/Kota terhadap 11 Variabel yang akan diukur menyebabkan Perangkat Daerah pada Kab/Kota dapat memahami apa yang harusnya disiapkan dan dilaksanakan pada saat penilaian Evaluasi. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menjalankan Roda Organisasi dengan efektif dan efisien.

2. Untuk capaian indeks kepatuhan atas maladministrasi Pelayanan Publik. Dari tahun ketahun mengalami kenaikan untuk capaian indeksnya dengan kondisi jumlah lokus yang berbeda ditiap tahunnya sejak tahun 2023-2025. pada tahun 2023 terdapat 3 PD lokus evaluasi yakni Dinas pendidikan, DPMPTSP, Dukcapil dan RSUD undata. Pada Tahun 2024 terdapat 5 PD lokus evaluasi yakni DPMPTSP, RSUD undata, Dinas pendidikan, Dukcapil dan Dinsos. Kemudian pada tahun 2025 terdapat 3 Lokus evaluasi yakni Dinsos, Dinas pendidikan dan RSUD undata dengan instrument penilaian yang baru.

Dalam perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tahun 2023 – 2025 terlihat dalam *Chart* penilaian garis yang naik – turun. Hal ini dikarenakan jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat semakin meningkat di tiap tahunnya. Namun hal ini juga bisa terjadi karena Masyarakat yang merasa belum puas dalam mendapatkan Pelayanan pada Instansi Pemerintah yang dituju.

3. Capaian kinerja SAKIP Pemda Prov. Sulteng selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2023 sebesar 11,45 meningkat 0,02 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 11,43 kemudian di tahun 2024 komponen pelaporan kinerja meningkat 0,08 poin dibandingkan Tahun 2023 terelaisasi sebesar 11,53 poin. Selanjutnya capaian kinerja di Tahun 2025 belum bisa di perbandingkan karena masih meunggu hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Kemenpanrb.
4. - Data realisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak tersedia, dikarenakan inkonsistensi Tim Pengawas Internal (TPI) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal memberikan hasil penilaian kepada Sekretariat RB Pemerintah Daerah.
- Penilaian RB Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan tahap awal penilaian untuk Renstra Biro Organisasi yang sesuai dengan RPJMD Periode 2025-2030.

- Penilaian RB Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode yang berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, yakni sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/1/Ro.Org tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Penilaian RB Perangkat Daerah menggunakan aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri (SURABE BERANI), dimana para pengampung indikator penyusun dari Indeks RB Perangkat Daerah ditunjuk sebagai evaluator masing-masing sesuai dengan indikator yang diampuhnya.
 - Sementara pada tahun sebelumnya, pelaksanaan evaluasi RB Perangkat Daerah hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dalam hal ini Inspektorat. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Penilaian RB Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelibatan Perangkat Daerah pengampung indikator penyusun Indeks RB Perangkat Daerah sebagai evaluator, melalui aplikasi SURABE BERANI dengan nilai capaian untuk tahun pertama renstra biro organisasi sebesar 112,5%. Adapun gambaran mengenai realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025, dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir.
5. Realisasi penerapan budaya kerja Perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 58,10% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 67,10% untuk capaian tahun 2025 Kemenpan RB Tidak Melakukan Penilaian.
6. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2024 sebesar 89,54. Untuk pencapaian tahun 2025 sebesar 90 ada peningkatan 1,46 Poin untuk Tahun 2023 sebesar 90,08 dapat dilihat dari pencapaian tahun 2024 mengalami penurunan.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.1.c
Tabel Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2030	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	37,97	39,25	96
2.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	87,95	96,00	91
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	85,02	91,00	93
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11.53	13.07	88
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal “B”	22.5	100	22
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	67,10	73	91
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	90	94	95

1. Berdasarkan target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026 evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat komposit (P4) sebesar 78 dan realisasi pada Tahun 2024 sebesar 77 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,71%.

Telah dilaksanakan upaya-upaya dalam rangka pembinaan terkait mendorong partisipasi aktif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota baik dalam bentuk rapat fasilitasi maupun rapat koordinasi. Sehingga pada saat pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada tahun-tahun berikutnya dapat mencapai target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.

2. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2026, terdapat beberapa temuan penting :
 - a. Untuk Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik, realisasi tahun 2025 mencapai 87,95 melampaui target akhir Renstra 2026 yang ditetapkan sebesar 54 dengan tingkat kemajuan sebesar 162%. Capaian yang sangat signifikan ini

menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam upaya perbaikan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 85,03 juga telah melampaui target akhir Renstra 2026 yang ditetapkan sebesar 83,50 dengan tingkat kemajuan 101,83%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Capaian yang melampaui target Renstra ini membuktikan bahwa program-program pembinaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Sub Bagian Pelayanan Publik telah berjalan efektif. Pencapaian ini menjadi modal kuat untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3. Dilihat dari perspektif target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026, berdasarkan realisasi SAKIP komponen pelaporan kinerja Pemda Prov. Sulteng Tahun 2024 sebesar 11,53 poin dari target sebesar 13,03 poin dengan capaian kinerja sebesar 88,48 persen
4. Target jangka menengah berdasarkan dokumen perencanaan strategis Biro Organisasi untuk indikator kinerja perangkat daerah dengan nilai RB minimal “B” adalah sebesar 40%. Sedangkan realisasi yang telah dicapai di tahun 2025 adalah sebesar 22,5%. Sehingga tingkat kemajuan untuk bisa mencapai target berikutnya adalah sebesar 22,5%. Hal ini tentunya bisa memberikan gambaran optimisme yang cukup positif agar dapat memenuhi target tahun selanjutnya. Dimana setiap tahun berikutnya terdapat trend pertambahan target yang konsisten sebesar 20%. Sehingga tetap dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mencapai target tersebut.
5. Dilihat dari perspektif target akhir tahun rencana strategi (Renstra) Tahun 2026, penerapan budaya kerja perangkat daerah di tahun 2025 sebesar 67,10 dari target 90 poin (sementara laporan capaian tahun 2024).
6. Dilihat dari perspektif target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,50 poin dari target sebesar 88,50 poin dengan capaian kinerja sebesar 101,17 persen.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Tabel 3.1.d
Tabel Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Standar Provinsi/ Nasil	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4-5
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	37,97	39,25	-1,28
2.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	87,95	86,65	1,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	85,02	82,00	1,63
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11,53	9,37	2,16
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal “B”	22,5	100	-77,5
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	67,10	72	-4,9
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	90	94	-4

1. Telah dilaksanakan Evaluasi dalam rangka Pembinaan kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di beberapa Kabupaten dengan hasil yang lebih baik disetiap tahunnya walaupun masih dibawah standar nasional. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran untuk melaksanakan Evaluasi kematangan di Kabupaten/Kota dan juga perlu dilakukan perbaikan sistem informasi yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan realisasi disetiap tahunnya mendapat nilai yang tinggi dan dapat mencapai nilai yang sesuai dengan Standar Nasional.
2. Berdasarkan evaluasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan pelayanan publik tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan pencapaian yang sangat membanggakan dalam skala nasional. Pada tahun 2024, Sulteng berada di peringkat ke-6 nasional dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 97.17 pada Zona Hijau dan Predikat A (kategori kualitas tertinggi).

Kemudian pada tahun 2025, posisi Sulteng meningkat menjadi peringkat ke-5 nasional dengan nilai 87,95 dan kategori Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian Sulteng berada di atas rata-rata. Untuk Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik, nilai Sulteng 87,95 lebih tinggi 1,3 poin dibandingkan rata-rata nasional sebesar 86,65. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah, nilai Sulteng 85,03 juga lebih tinggi 3,03 poin dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 82,00. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara konsisten telah memberikan hasil yang signifikan dan menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi terdepan dalam pelayanan publik di Indonesia.

3. Jika dibandingkan dengan capaian daerah lain, nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2024 lebih tinggi 2,16 poin dari realisasi Kota Palu sebesar 9,37 poin
4. Tidak terdapat standar nasional yang ditetapkan untuk indikator persentase perangkat daerah dengan nilai RB minimal “B”.

Penerapan budaya kerja pemda Provinsi Sulawesi Tengah dengan Indeks (67,10) kategori **Cukup Sehat (B)** dengan Orientasi Pelayanan (54.2%), Akuntabel (70.9%), Kompeten (54,0%), Harmonis (55.2%), Loyal (62.1%), Adaptif (39,4%) dan Kolaborati (66,7%) dan daerah lain yaitu sama bahwa pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai berAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dalam katagori Cukup. Dengan perbandingan Target Nasional 68.1 % secara target Provinsi Sulawesi Tengah Mencapai Target Naional kategori Cukup Sehat **(B)**.

Pada pelaksanaan survei indeks berakhlak NASIONAL oleh MENPAN tidak dilaksanakan ditahun 2025 dan hanya melaksanakan survei internal budaya kerja BerAKHLAK untuk mengukur budaya kerja pada lingkup perangkat daerah.

5. Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi Tahun 2025 lebih tingi 0,46 Poin dari realisasi IKM Tahun 2024.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Indikator Indeks Kematangan Organisasi

Keberhasilan dan Kegagalan pada evaluasi kelembagaan pada instansi pemerintah dalam pencapaian peringkat komposit (P4) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi:

- Faktor Keberhasilan :

- a. Terlaksananya evaluasi kelembagaan instansi pemerintah provinsi sulawesi tengah dengan baik serta mengalami peningkatan peringkat komposit (P4) yang signifikan dari tahun ke tahun.
- b. Dari sisi standar dan proses organisasi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tergolong efektif, sehingga struktur dan proses organisasi yang ada mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan eksternal organisasi.
- c. Adanya kerjasama yang solid dalam melaksanakan komunikasi dan kolaborasi tim dalam memperbaiki strategi dan proses kerja.

- Faktor Kegagalan :

- a. Kurangnya respon perangkat daerah dalam penyampaian data dukung sehingga mempengaruhi peringkat komposit.
- b. Keterbatasan anggaran sehingga evaluasi hanya dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
- c. Kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Evaluasi hanya dianggap sebagai formalitas administrasi bukan sebagai alat perbaikan kinerja.
- e. Tidak ada mekanisme sanksi.
- f. Kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Banyak OPD yang menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menghambat implementasi kebijakan yang efektif serta pencapaian tujuan organisasi.

2. Pembagian Tugas yang Tidak Jelas

Struktur organisasi yang tidak jelas dan pembagian tugas yang tidak terdefinisi dengan baik dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar bagian dan ketidakefektifan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3. Keterbatasan Anggaran

Pembiayaan yang tidak memadai menjadi salah satu kendala dalam pengembangan dan peningkatan kinerja OPD. Tanpa anggaran yang memadai, implementasi program-program yang mendukung kematangan organisasi menjadi terhambat.

4. Keterbatasan dalam Monitoring dan Evaluasi

Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, sulit untuk mengetahui apakah program dan kebijakan yang dijalankan oleh OPD berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi.

5. Kurangnya Komitmen terhadap Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang masih setengah hati atau belum sepenuhnya dijalankan menghambat perbaikan sistem yang ada. Tanpa komitmen kuat terhadap reformasi ini, kemajuan menuju OPD yang matang menjadi lebih lambat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai Evaluasi Kelembagaan Kab/Kota Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kelembagaan

Biro Organisasi telah menyusun pedoman yang jelas dan terstruktur terkait evaluasi kelembagaan, agar proses evaluasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Penguatan Pengawasan dan Monitoring

Biro Organisasi meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan dengan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

3. Penyusunan Laporan Evaluasi secara Berkala

Menyusun dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kelembagaan secara berkala kepada pimpinan daerah dan pihak terkait, guna memperbaiki dan menyempurnakan sistem kelembagaan yang ada.

4. Koordinasi dan Kolaborasi antar Instansi

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Biro Organisasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa evaluasi kelembagaan melibatkan seluruh pihak yang relevan, serta mendapatkan dukungan yang lebih optimal.

Secara teknis evaluative menunjukkan bahwa kualitas dokumen evaluasi kematangan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen sesuai dengan indikator penilaian guna meningkatkan kualitas evaluasi kematangan Perangkat Daerah. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan dokumen evaluasi, oleh karena itu diperlukan penganggaran yang sesuai dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas dokumen sesuai indikator yang ditetapkan.



2. Indikator Kepatuhan Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah

- Faktor Keberhasilan

a. Pelaksanaan Desk Secara Langsung

Tim Sub Pelayanan Publik secara rutin melakukan desk evaluation atau evaluasi meja terhadap dokumen-dokumen dan sistem pelayanan publik di setiap Perangkat Daerah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi permasalahan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan sebelum evaluasi formal dilakukan.

b. Observasi Lapangan Secara Langsung

Kunjungan langsung ke unit-unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa standar pelayanan diterapkan dengan baik di lapangan. Melalui observasi langsung, tim dapat melihat kondisi nyata pelayanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas pelayanan, serta memberikan masukan konstruktif

untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan proaktif ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan.

- Faktor Kegagalan/Tantangan

a. Komitmen Pimpinan OPD Dalam Menanggapi Hasil Evaluasi

Masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan publik secara optimal. Hal ini terlihat dari lambatnya respons terhadap rekomendasi perbaikan serta minimnya upaya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Komitmen pimpinan OPD menjadi kunci utama dalam implementasi perbaikan, karena tanpa dukungan dan arahan yang kuat dari pimpinan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak akan berjalan efektif.

- Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengatasi tantangan terkait komitmen pimpinan OPD, Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa langkah strategis:

- a. Melakukan koordinasi rutin dengan pimpinan OPD untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan;
- b. Menyediakan pendampingan teknis dan bimbingan berkelanjutan kepada OPD dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang standar pelayanan minimal;
- d. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dilaksanakan dengan baik;
- e. Memberikan apresiasi kepada OPD yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam pelayanan publik untuk memotivasi komitmen berkelanjutan.

Dengan strategi yang komprehensif ini, diharapkan seluruh OPD dapat meningkatkan komitmennya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Indikator Nilai Sakip Komponen Pelaporan Kinerja

Hambatan/permasalahan yang di hadapi antara lain :

- a. Data realisasi kinerja yang Tidak Konsisten atau Tidak Lengkap sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemda berulang kali di revisi.
- b. Informasi capaian kinerja belum komprehensif dan mendalam yang di sajikan oleh Perangkat Daerah Pengampu IKU Pemda kinerja Perangkat Daerah Kesulitan menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja jika dihubungkan dengan Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator kinerja. Hal ini dikarenakan oleh informasi dari PD tersebut masih sedikit/kurang dan belum secara langsung berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut.
- c. Keterlambatan pengumpulan data dari unit-unit kerja di Perangkat Daerah sehingga penyampaian Laporan Kinerja ke Biro Organisasi tidak tepat waktu serta menghambat penyusunan Laporan Kinerja Pemda.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan penuh dari pimpinan serta motivasi pegawai mempercepat proses penyusunan laporan Kinerja Pemda.
- b. Secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Melakukan Desk penyusunan Laporan Kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah agar melengkapi 7 informasi capaian kinerja.
- d. Tepat waktu mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tepat waktu.
- e. Melakukan Desk penyusunan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah



4. Indikator Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal B

- Faktor Keberhasilan

- a. Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian menunjukkan kerjasama yang baik dalam melakukan pengisian LKE RB Perangkat Daerah melalui aplikasi SURABE BERANI.
- b. Perangkat Daerah Pengampuh RB menunjukkan kolaborasi dan koordinasi yang cukup efektif terhadap Perangkat daerah yang dilakukan penilaian.
- c. Biro Organisasi selaku Sekretariat RB telah melakukan fasilitasi dan koordinasi kepada Perangkat Daerah Pengampuh RB maupun 40 (empat puluh) Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian dengan menerapkan beberapa metode baik secara daring maupun luring.

- Faktor Kegagalan

- a. Masih terdapat evaluator yang tidak tuntas melakukan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi SURABE BERANI.
- b. Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak tuntas melakukan pengisian dokumen/bukti dukung setiap indikator yang termuat dalam aplikasi SURABE BERANI.
- c. Masih terdapat evaluator yang kurang detail dalam menjabarkan permintaan bukti dukung yang perlu dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dinilai pada aplikasi SURABE BERANI.
- d. Masih terdapat perilaku mentalitas silo pada internal Perangkat Daerah khususnya di unit kerja sekretariat Perangkat Daerah selaku pengampuh indeks RB Perangkat Daerah.
- e. Sekretariat RB pada Biro Organisasi belum maksimal melakukan pembinaan ke Perangkat Daerah yang dinilai dan juga pada Perangkat Daerah yang menjadi evaluator RB Tahun 2025.

- Solusi untuk mengatasi Kegagalan

- a. Fungsi manajerial Sekretaris Perangkat Daerah harus dimaksimalkan dalam meningkatkan nilai RB Perangkat Daerahnya.

- b. Perlunya pengembangan aplikasi SURABE BERANI yang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mendorong kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam layanan.
- d. Memastikan agar :
 - 1) Evaluator tuntas melakukan penilaian LKE RB PD di SURABE BERANI.
 - 2) Perangkat Daerah tuntas melakukan pengisian dokumen/bukti dukung setiap indikator LKE RB PD di SURABE BERANI dengan cara aktif mengingatkan baik secara tertulis maupun melalui WA Grup.



5. Indikator Indeks Ber-Akhlak Pemda

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah antara lain:

- Bahwa nilai-nilai dasar ASN serta panduan perilaku BerAKHLAK terinternalisasi dengan baik di seluruh jajaran pegawai pada Perangkat Daerah masing-masing.
- Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait survei Berakhlak, kurangnya sosialisasi terkait budaya kerja kepada perangkat daerah serta belum adanya kamus kompetensi budaya kerja.



6. Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi antara lain :

1. Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat belum efektif dan tidak menyeluruh ke semua bagian Pelayanan Pada Biro Organisasi.
2. Kurangnya pengetahuan responden terhadap pentingnya pengisian Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasil kuisioner kurang objektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Pembagian kuisioner dilakukan secara merata kesemua bagian pelayanan dengan menunjuk 1 koordinator untuk mengawasi dan mengumpulkan kuisioner

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.f
Tabel Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5-8
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	37,97	32,05	557.137.800	533.554.470	95	-1.47
2.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	54	87,95	190.357.900	173.451.640	91	-9.70
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	83.50	85.03				
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13.02	11,53	94.559.934	90.227.858	95	2.57
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB Minimal “B”	20	22,5	143.479.900	138.206.240	96	-9.94
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	68	67,10	22.519.900	21.105.385	93	1,4
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	89	90,40	1.146.387.050	1.133.973.821	99	10.27

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.1.g Analisis Program/kegiatan Yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian pernyataan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
1	2	3	4		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Indeks	89	1,146,387,050	89,54	1,133,973,821	90	98.92
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Nilai SAKIP Biro Organisasi Target Nilai 84	Nilai	84	49,787,650	83.70	49,110,036	83,70	98.64
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Biro	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Yang Disusun	Dokumen	7	49,787,650	7	49,110,036	100	98.64
		Tersusunnya Pelaporan Kinerja Lingkup Biro	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Yang Disusun	Dokumen	6		6		100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase pengelolaan Keuangan yang terpenuhi sesuai ketentuan	Persentase	100	368,560,000	100	364,692,000	100	98.95
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya Gaji Non ASN dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN/Non ASN yang tepat waktu	Dokumen	14	368,560,000	11	364,692,000	78	98.95
		Diterbitkannya SPM Tepat Waktu	Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu	Dokumen	250		241		96	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian	Persentase	100	4,750,000	100	4,750,000	100	100.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Lembar	-	-	0	-	0	
2	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	orang	15	4,750,000	15	4,750,000	100	100.00
		Tersusunnya Data Kepegawaian Biro Organisasi	Jumlah Data Kepegawaian yang disusun	Dokumen	6		6		100	
		Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi yang disusun	Dokumen	3		3		100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pelayanan Administrasi kantor yang tersedia dan terpenuhi	Persentase	100	375,089,950	100	367,702,785	100	98.03

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025

1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	107,728,400	6	106,717,660	100	99.06
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	24,089,550	2	23,492,345	100	97.52
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkordinasinya Pelaksanaan Organisasi di Tingkat Provinsi Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota Yang Terkoordinasi	Kab/kota	14	243,272,000	11	237,492,780	100	97.62
		Tersusunnya Dokumen Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi Yang Disusun	Dokumen	2		2		100	
		Tersusunnya Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	Laporan	1		1		100	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Biro Organisasi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	Persentase	100	-	100	-	100	#DIV/0!
1	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	unit	-	-	0	-	0	0.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penataan Kearsipan Biro Organisasi Memenuhi Standar	Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar	Persentase	100	13,673,450	100	13,196,600	100	96.51
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasikannya Surat Masuk dan Surat Keluar	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Teradministrasi	Persentase	100	13,673,450	100	13,196,600	100	96.51
		Tertatanya dan Tersimpannya Arsip	Persentase Arsip yang Tertata Sesuai Ketentuan	Persentase	100		100		100	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang dan Aset Biro	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi	Persentase	100	334,526,000	100	334,522,400	100	100.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	Unit	22	301,716,000	22	301,712,400	100	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Unit	50	32,810,000	50	32,810,000	100	100.00
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	37,97	1,008,055,434	32,05	956,545,593	84	94.89
		Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	54		54.00		100.00	

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025

		Meningkatnya kualitas SAKIP pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen pelaporan kinerja	Nilai	13,02		11,53		88	
		Meningkatnya penerapan budaya kerja pada perangkat daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	Indeks	68		67,10		98	
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Minimal "B"	Persentase	20		22,5		112,5	
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terwujudnya Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Proses dan tepat Ukuran	Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dimensi Struktur	Persentase	78	421.664,100	78	405.750,760	100	96.23
		Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Kelembagaannya	Persentase	100		100		100	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Jabatan	Persentase SKJ yang mendapatkan Persetujuan MENPAN RB	Persentase	100		100		100	
			Persentase evaluasi jabatan yang mendapatkan Persetujuan MENPAN RB	Persentase	100		100		100	
			Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang mendapatkan Persetujuan MENPAN RB	Persentase	100		100		100	
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya evaluasi Kelembagaan Povinsi	Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan Provinsi	Laporan	1	98.584,800	1	91.788,420	100	93.11
		Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah	Jumlah penataan kelembagaan perangkat Daerah	Dokumen	1		1		100	
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terbitnya Dokumen Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan	Persentase	100	107.918,300	100	107.109,920	100	99.25
		Terevaluasinya Kelembagaan Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks Kematangan Kategori Sedang	Kab/kota	3		3		100	
3	Penataan Analisis Jabatan	Terfasilitasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	40	215,161,000	40	206.852,420	100	96.14
		Tervalidasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural perangkat daerah	Jumlah SKJ yang mendapatkan Rekomendasi	Dokumen	1		1		100	
		Terfasilitasinya dokumen Evaluasi Jabatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Dokumen	50		50		100	

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

		Terfasilitasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang di Fasilitasi	Perangkat Daerah	40		40		100	
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Meningkatnya kualitas Pembangunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Rencana Aksi RB General Perangkat Daerah dengan Kategori Baik	Persentase	100	586,391,334		550,794,833		93.93
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah yang memenuhi 7 Informasi	Persentase	85.00		82.00		96	
			Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) Penda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase	100		100		100	
		Meningkatnya Penerapan sistem kerja baru pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kerja baru	Persentase	85.00		85.00		100	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menyesuaikan Proses Bisnis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru	Persentase	85		85		100	
		Meningkatnya Implementasi Budaya Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja berAKHLAK	Persentase	60		100		167	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mandiri Kategori Baik		100		100		100	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan Nilai IKM Baik	Persentase	60		60		100	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase unit lokus evaluasi (ULE) Provinsi dengan nilai kepatuhan zona hijau	Persentase	100		92		92.00	
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terbinaanya Perangkat Daerah pada Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	Perangkat Daerah	40	143,479,900	40	138,206,240	100	96.32
		Termonitoringnya Pelaksanaan Rencana Aksi RB Penda pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring	Perangkat Daerah	40					

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025

		Tersusunnya Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan RB perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Rekomendasi	40		40		100	
		Tersusunnya Kab/Kota dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab/kota	2		2		100	
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya LKIP Pemerintah Daerah	Jumlah LKIP Pemerintah Daerah	Dokumen	1	94,559,934	1	90,227,858	100	95.42
		Terverifikasinya LKIP Perangkat Daerah	Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	Perangkat Daerah	48		48		100	
		Terbinanya SAKIP Kab/Kota Komponen Pelaporan Kinerja	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait pelaporan kinerja	Kab/kota	3		3			
		Tersusunnya IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2		2		100	
		Terverifikasinya IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah IKU revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	Perangkat Daerah	48		48		100	
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terinternalisasinya Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai Evaluasi Budaya Kerja kategori SEHAT	Perangkat Daerah	40	22,519,900	1	21,105,385	100	93.72
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terbinanya Perangkat Daerah tentang pelaksanaan Sistem Kerja baru	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	Perangkat Daerah	40	135,473,700	40	127,803,710	100	94.34
		Tersusunnya Dokumen Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Prodis dan SOP Perangkat Daerah yang tersusun	Perangkat Daerah	40		40		100	
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terbinanya Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina pelayanan publiknya	Perangkat Daerah	50	190,357,900	50	173,451,640	100	91.12
		Terimplementasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Standar Pelayanannya	Perangkat Daerah	50		50		100	
		Terbinanya Perangkat Daerah dalam Implementasi SKM Online	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara online	Perangkat Daerah	2		2		100	
		Terbinanya Kab/kota terkait Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Kab/Kota yang di bina Pelayanan Publiknya untuk Persiapan Evaluasi	Kab/kota	13		13		100	

		Terdampingnya Perangkat Daerah Lokus Evaluasi dalam Kepatuhan Atas Pelaksanaan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Lokus Yang Didampingi Pelaksanaan Kepatuhan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5		5		100	
						2,154,442,484		2,090,519,414	63,923,070	97.03

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2025, anggaran pendukung sebesar Rp. 2.154.442.484,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 0,-
2. Belanja Barang dan Jasa
BELANJA OPERASI Rp. 2.118.952.488,-
Rp. 2.118.952.488,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 35.490.000,-
Total Pagu anggaran Rp. 2.154.442.484,-

Tabel 3.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.146.387.050	1.133.973.821	98%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.787.650	49.110.036	99%
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	49.787.650	49.110.036	99%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	368.560.000	364.692.000	100%
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.560.000	364.692.000	100%
3.	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.750.000	4.750.000	100%
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
4.	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4.750.000	4.750.000	100%
4.	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	375.089.950	367.702.785	98%

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	3	4	5	6
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.728,400	106.717.660	100%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	24.089.550	23.492.345	98%
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.272.000	237.492.780	98%
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.673.450	13.196.600	97%
8.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	13.673.450	13.196.600	97%
6.	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
9.	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.526.000	334.522.400	100%
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	301.716.000	301.712.400	100%
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.810.000	32.810.000	100%
II	PENATAAN ORGANISASI	1.008.055.434	956.545.593	94%
8.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	421.664.100	405.750.760	96%
12.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	98.584.800	91.788.420	93%
13.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabuapten/kota	107.918.300	107.109.920	99%
14.	Penataan Analisis Jabatan	215.161.000	206.852.420	96%
9.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	586.391.334	550.794.833	94%
15.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	143.479.900	138.206.240	96%
16.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	94.559.934	90.227.858	95%
17.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	22.519.900	21.105.385	94%
18.	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	135.473.700	127.803.710	94%
19.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	190.357.900	173.451.640	91%
	Total	Rp.2.154.442.484	RP.2.090.519.414	97%

Dari tabel 3.2 dapat dilihat, bahwa total anggaran Biro Organisasi tahun 2025 sebesar **Rp. 2.154.442,484,-** direalisasikan sebesar **Rp. 2.090.519.414,-**

dengan persentase **97%**, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar **3%**. Hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya komitmen bersama, kerja sama dalam peningkatan SDM pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan.

3.3 Inovasi

Dalam rentang tahun 2025, dilakukan pengembangan Sistem Informasi Jabatan Terpadu (Sijabat) untuk membangun Penataan Jabatan dalam rangka penataan SDM Aparatur lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengintegrasikan Data Anjab, ABK, Peta Jabatan, Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Untuk informasi Peta Jabatan, Anjab & ABK, Hasil Identifikasi Kebutuhan Jabatan Pelaksana, Rekomendasi & Penetapan Formasi Jabatan Fungsional serta Daftar Pemangku Jabatan setiap Perangkat Daerah dapat mengakses Aplikasi Dashboard SIJABAT (Sistem Informasi Jabatan). Aplikasi ini merupakan penggabungan dari Aplikasi SIANIDA (Sistem Informasi Analisis Data Jabatan) & SIPANDAI (Sistem Informasi Pemangku Jabatan Perangkat Daerah Terintegrasi). Penggabungan 2 aplikasi ini dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan Data ASN.

Selain itu, dilakukan juga implementasi Aplikasi SURABE BERANI (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri) sebagai bagian dari pengukuran reformasi birokrasi yang terintegrasi, mandiri dan bebas dari intervensi.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, dilakukan juga implementasi inovasi berupa media podcast sebagai sarana komunikasi yang lebih fleksibel, menarik, dan mudah diakses. Dengan dukungan sarana ruangan Podcast BISA BO, diharapkan proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif, interaktif dan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Podcast bisa dijangkau audiens yang lebih luas pada aplikasi digital seperti Instagram Podcast BISA BO.

3.4. Penghargaan

Untuk Biro Organisasi sebagai tim Pendukung untuk mendapatkan penghargaan dalam bidang Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah pada tahun 2025 diangka **87.95** yang terdiri dari RSUD Undata, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dengan sulteng yang berada pada posisi ke 5 dari 34 provinsi di Indonesia dan Nilai LAKIP Biro Organisasi dengan Nilai Akuntabilitas 83.70 Kategori (A). Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendapat Nilai 83,70 dalam kategori A.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Biro Organisasi adalah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam Perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, supervise pemantauan dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik, Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator, maka dapat dikatakan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat di kategorikan **Sangat Baik** hal ini terdiri dari 6 (Enam) Sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja melalui penyelarasan sasaran strategis indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.
- 2) Penguatan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi, melalui peningkatan kualitas pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal secara berjenjang, serta pemanfaatan system informasi kinerja dan layanan public berbasis digital.

- 3) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROV. SULTENG



NENG ELLY, SH, MM

Pembina Utama Muda

Nip.19730601 199503 2 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NENG ELLY, SH. MM**

J a b a t a n : **Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Dra. NOVALINA, MM**

J a b a t a n : **Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.**

Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pemangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
Nip.196703271989031009

PIHAK PERTAMA

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	- Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13,05
2.	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsi, Tepat Proses dan tepat Ukuran	- Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah yang Proporsional - Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/kota - Nilai Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Daerah	100 % 36 78
3.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	- Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Sistem Kerja Baru	100 %
4.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	- Indeks Ber-Akhlak pemda	76
5.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	- Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B	70 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PD	- Indeks Pelayanan Publik	4,1
7.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	- Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	98
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	- Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	90,10

Program

- Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Penataan Organisasi

Anggaran

Rp. 1.337.660.230
Rp. 1.436.097.550

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dr. SULAEHA, MM**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **NENG ELLY, SH. MM**

J a b a t a n : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Dr. SULAEHA, MM
Pembina
NIP. 19720502 200701 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Jabatan	Persentase SKJ PD Yang Sesuai Rekomendasi Kemenpan RB	100%
		Persentase Evaluasi Jabatan yang Tervalidasi	100%
		Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang mendapat Rekomendasi Kemen PAN RB	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro	Nilai SAKIP Biro Organisasi	84
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dan terpenuhi	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Memperoleh Layanan Kepegawaian	100%
6.	Meningkatnya Sarana Prasarana Biro Organisasi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	100%
7.	Meningkatnya Penataan Kearsipan Biro Organisasi Memenuhi Standar	Persentase pelayanan kearsipan yang Memenuhi Standar	100%
8.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang dan Aset Biro	Persentase Barang Milik daerah terpelihara dan terinventarisasi	100%

Sub Kegiatan

- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran

Rp. 324.678.750,-
Rp. 50.243.800,-
Rp. 423.090.000,-
Rp. 20.530.000,-
Rp. 497.808.230,-
Rp. 23.643.200,-
Rp. 314.530.000,-

KEPALA BIRO ORGANISASI



NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN



Dr. SULAEHA, MM
Pembina
NIP. 19720502 200701 2 016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN EVALUASI JABATAN DAN KOMPETENSI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ROSYANI, SE**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI JABATAN
KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Dr. SULAEHA, MM**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KE DUA



Dr. SULAEHA, MM
Pembina
NIP. 19720502 200701 2 016

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA



ROSYANI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760414 200211 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terfasilitasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah yang tersusun	40 Perangkat Daerah
2.	Tervalidasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural perangkat daerah	Jumlah Jabatan SKJ yang Mendapat Rekomendasi	1 Dokumen
3.	Terfasilitasinya dokumen Evaluasi Jabatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	40 Perangkat Daerah
4.	Tervalidasinya Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan yang Tervalidasi	1 Dokumen

Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Anggaran

Rp. 324.678.750,-

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN
KOMPETENSI JABATAN



Dr. SULAHA, SP,MM

Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI
JABATAN DAN KOMPETENSI JABATAN



ROSYANI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19760414 200211 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PLT. KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD ANSHAR H. MAUMBU, S.STP, MM**

J a b a t a n : **Plt.KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Dr.SULAEHA, MM

Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD ANSHAR H. MAUMBU, S.STP, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19911020 201206 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt. Kepala Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terverifikasinya Dokumen Usulan Formasi Jabatan Fungsional dari Perangkat Daerah	Persentase Usulan Permohonan Jabatan Fungsional yang terverifikasi	100%
2.	Terfasilitasinya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang difasilitasi	40 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Rp. 324.678.750,-

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN



Dr. SULAHA, SP,MM

Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

Plt. KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



MUHAMMAD ANSHAR H. MAUMBU, S.STP,MM

Penata Muda Tingkat I

NIP.19880823 201503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MARYANI SUNI, S. Sos**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Dr. SULAEHA, SP, MM**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

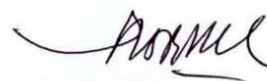
PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. SULAEHA", written over a horizontal line.

Dr. SULAEHA, MM
/Pembina
NIP. 19720502 200701 2 016

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MARYANI SUNI", written over a horizontal line.

MARYANI SUNI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19700309 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Biro organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	7 Dokumen
2.	Tersusunnya Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	6 Dokumen
3.	Terbayarkannya Gaji Non ASN dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN/Non ASN yang tepat waktu	14 Dokumen
4.	Diterbitkannya SPM Tepat Waktu	Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu	300 Dokumen
5.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Laporan
6.	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket
7.	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket
8.	Terkoordinasinya Pelaksanaan Organisasi di Tingkat Provinsi Kabupaten/kota	Jumlah PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi	14 Kab/Kota
9.	Tersusunnya Dokumen Proses proses Bisnis dan standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Proses Bisnis dan SOP Biro Organisasi	2 Laporan
10.	Tersusunnya Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	1 Laporan
11.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
12.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
13.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
14.	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi	3 Dokumen
15.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	0 Paket
16.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 Unit
17.	Teradministrasinya Surat Masuk dan Surat Keluar	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Teradministrasi	100%
18.	Tertatanya dan Tersimpannya Arsip	Persentase Arsip yang tertata sesuai ketentuan	100%
19.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	22 Unit
20.	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit

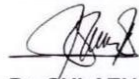
Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran

Rp. 48.485.550,-
Rp. 410.490.000,-
Rp. 0,-
Rp. 10.910.000,-
Rp. 125.956.030,-
Rp. 29.999.950,-
Rp. 365.830.700,-
Rp. 23.643.200,-
Rp. 0,-
Rp. 271.107.000,-
Rp. 49.480.000,-

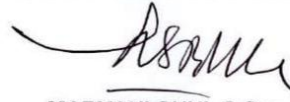
KEPALA BAGIAN ANALISA DAN
FORMASI JABATAN



Dr. SULAEGA, MM
Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



MARYANI SUNI, S.Sos
Penata Tingkat I

NIP. 19700309 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	- Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota yang diterbitkan - Persentase Kab/Kota dengan Indeks Tingkat Kematangan Organisasi Kategori Sedang	100% 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Peringkat Komposit P-4	80%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Persentase indikator Reformasi Birokrasi perangkat daerah yang terpenuhi	100%

Kegiatan

- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Anggaran

Rp. 519.709.900,-

KEPALA BIRO ORGANISASI

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI

Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PLT. KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL AZIZ DG MATANTU, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. FITRIANA LARATU, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002


ABDUL AZIZ DG MATANTU, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19860413 200701 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dra. FITRIANA LARATU, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **NENG ELLY, SH. MM**
J a b a t a n : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1973001 199503 2 002


Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbinanya Perangkat Daerah pada Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	40 Perangkat Daerah
2.	Termonitoringnya Pelaksanaan Rencana Aksi RB Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	40 Laporan
3.	Tersusunnya Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	40 Rekomendasi
4.	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang di Bina Pelaksaaan Reformasi Birokrasi	3 Kab/Kota

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah Kab/Kota

Rp. 173.236.400,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFOMASI BIROKRASI

Plt. KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI
BIROKRASI



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002



ABDUL AZIZ DG MATANTU SIP, M.Si
Pembina
NIP. 19860413 200701 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUCHLIS ABD. LATIF, SH
J a b a t a n : KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
J a b a t a n : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

MUCHLIS ABD. LATIF, SH
Penata
NIP. 19880823 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbitnya Dokumen Penataan Kelembagaan Kab/ Kota	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota yang terbitkan	100%
2.	Terevaluasinya Kelembagaan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks kematangan Kategori Sedang	4 Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

Rp. 173.236.600,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA



MUCHLIS ABD.LATIF, SH
Penata
NIP. 19880823 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbitnya Dokumen Penataan Kelembagaan Kab/ Kota	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota yang terbitkan	100%
2.	Terevaluasinya Kelembagaan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks kematangan Kategori Sedang	13 Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

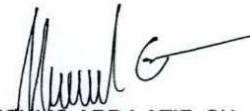
Rp. 173.236.600,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002



MUCHLIS ABD.LATIF, SH
Penata
NIP. 19880823 201503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FENTI INDAH WATY, SH**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. FITRIANA LARATU, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

FENTI INDAH WATY, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19770515 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan Provinsi	1 Laporan
2.	Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

Rp. 173.236.900,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI

Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI

FENTI INDAHWATY, SH
Penata
NIP. 19770515 200904 2 002

PERNYATAAN ~~PERJANJIAN~~ KINERJA
KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **LINDAYANI, SH, MAP**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **NENG ELLY, SH. MAP**

J a b a t a n : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NENG ELLY, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730601 199503 2 002

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

LINDAYANI, SH, MAP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730216 199603 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah daerah	Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah yang memenuhi 7 Informasi	85 %
2.	Meningkatnya kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Persentase Indiaktor Kinerja Utama (IKU) Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %
3.	Meningkatnya Penerapan sistem kerja baru pada Perangkat daerah	Persentase PD yang telah menerapkan sistem kerja baru	85 %
4.	Meningkatnya Kualitas Peta Proses Bisnis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Persentase PD yang telah menyesuaikan Probis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru	85 %
5.	Meningkatnya Implementasi Budaya Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja Ber AKHLAK	100 %
6.	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik	60 %
		- Persentase Kab/kota dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Baik	100 %
7.	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Ombudsman Yang Meningkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik	100 %

Kegiatan

- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Anggaran

Rp. 519.708.900,-

KEPALA BIRO ORGANISASI



NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK



LINDAYANI, SH. MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARIDA H.PALENGA, S. KOM, MAP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LINDAYANI, SH, MAP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lindayani", written over a horizontal line.

LINDAYANI, SH, MAP

Pembina

NIP. 19860413 200701 1 001

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Farida H. Palenga", written over a horizontal line.

FARIDA H.PALENGA, S.KOM, MAP

Penata Tingkat I

NIP. 19860108 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya LKIP Pemda	Jumlah LKIP Pemda yang tersusun	1 Dokumen
2.	Terverifikasinya LKIP Perangkat Daerah	Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	48 Perangkat Daerah
3.	Terbinanya SAKIP Kab/Kota Komponen Pelaporan Kinerja	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait pelaporan kinerja	3 Kab/Kota
4.	Tersusunnya IKU dan Perjanjian Kinerja Pemda	Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja pemda	2 Dokumen
5.	Terverifikasinya IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	48 Perangkat Daerah

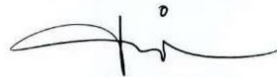
Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Anggaran

Rp. 173.236.700,-

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK



LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS
KINERJA



FARIDA H. RALENGA, S. KOM, MAP
Penata Tingkat I
NIP. 19860108 201001 2 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **AMIRUDDIN LATUCONSINA, S. Sos**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KERJA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **LINDAYANI, SH, MAP**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA

LINDAYANI, SH, MAP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730216 199603 2 003

PIHAK PERTAMA

AMIRUDDIN LATUCONSINA, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19760607 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Budaya Kerja

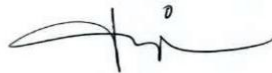
No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pembinaan Sistem Kerja baru pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	40 Perangkat Daerah
2.	Tersusunnya Dokumen Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyesuaikan Proses Bisnis dan SOP	40 Dokumen
3.	Terinternalisasinya Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi Budaya Kerjanya kategori Baik	40 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp. 73.236.300,-
- Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp. 99.999.750,-

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK



LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA
DAN BUDAYA KERJA



AMIRUDDIN LATUCONSINA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19760607 201101 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NURAINI, S.STP, M.Si**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **LINDAYANI, SH, MAP**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lindayani", written over a horizontal line.

LINDAYANI, SH, MAP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nuraini", written over a horizontal line.

NURAINI, S.STP, M.Si

Pembina
NIP. 19861101 200412 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbinanya Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina Pelayanan Publiknya	50 Perangkat Daerah
2.	Terimplementasinya Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Standar Pelayanannya	50 Perangkat Daerah
3.	Terbinanya Perangkat Daerah dalam implementasi SKM Online	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara online	50 Perangkat Daerah
4.	Terbinanya Kab/Kota terkait Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Kab/Kota yang dibina Pelayanan Publiknya untuk persiapan evaluasi	13 Kab/kota
5.	Terdampinginya Perangkat Daerah Lokus Evaluasi dalam Kepatuhan atas Pelaksanaan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi yang didampingi dalam Pelaksanaan Kepatuhan Pelayanan Publik	5 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Anggaran

Rp. 173.236.300,-

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK

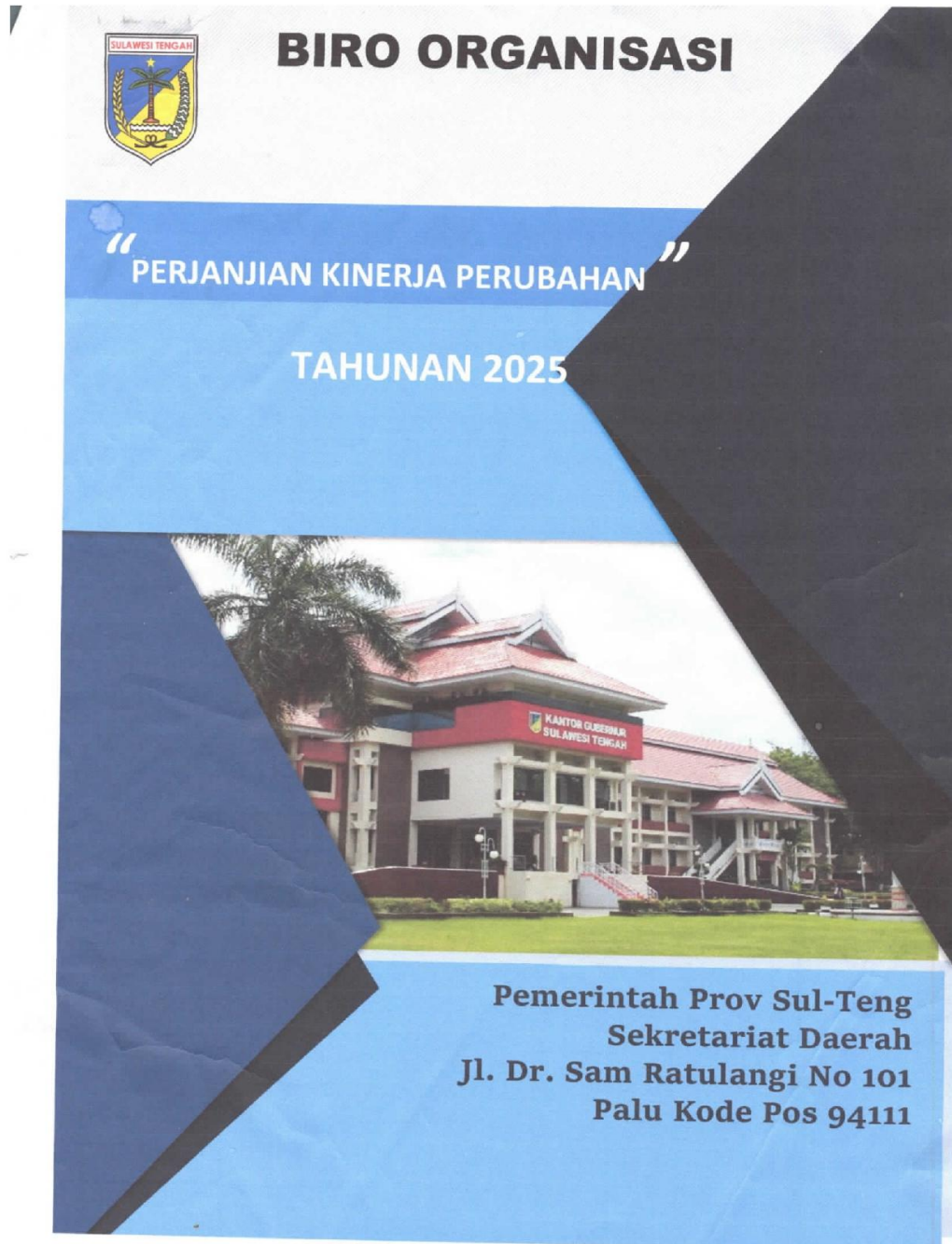


LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

KEPALA SUB BAGIAN
PELAYANAN PUBLIK



NURAINI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19861101 200412 2 002





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NENG ELLY, SH. MM
Jabatan : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Kinerja Pegawai, Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	89
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	37,97
3.	Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	54 83,50
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13,02
5.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai RB Minimal "B	20
6.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	68

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Biro Organisasi		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 946.471.450,-	APBD
2 Program Penataan Organisasi	Rp. 672.971.050,-	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. SULAEHA, MM**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NENG ELLY, SH. MM**
Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

Dr. SULAEHA, MM

Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

PIHAK KEDUA

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Jabatan	Persentase Standar Kompetensi Jabatan Yang Mendapatkan Persetujuan Menpan RB	100%
		Persentase Evaluasi Jabatan Yang Mendapatkan Persetujuan MenPAN RB	100%
		Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Persetujuan MenPAN RB	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Nilai SAKIP Biro Organisasi	84
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dan terpenuhi	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Memperoleh Layanan Kepegawaian	100%
6.	Meningkatnya Sarana Prasarana Biro Organisasi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	100%
7.	Meningkatnya Penataan Kearsipan Biro Organisasi Memenuhi Standar	Persentase pelayanan kearsipan yang Memenuhi Standar	100%
8.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang dan Aset Biro	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dan terinventarisasi	100%

Sub Kegiatan

- Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran

Rp. 156.966.850,-
Rp. 20.886.000,-
Rp. 410.490.000,-
Rp. 4.795.000,-
Rp. 254.622.000,-
Rp. 13.673.450,-
Rp. 242.005.000,-

KEPALA BIRO ORGANISASI

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN

Dr. SULAEGA, MM
Pembina
NIP. 19720502 200701 2 016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MARYANI SUNI, S. Sos**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Dr. SULAEHA, SP, MM**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



Dr. SULAEHA, MM
Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

Palu, 18 September 2024

PIHAK PERTAMA



MARYANI SUNI, S.Sos
Penata Tingkat I

NIP. 19700309 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Biro organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	7 Dokumen
2.	Tersusunnya Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Biro Organisasi Yang Disusun	6 Dokumen
3.	Terbayarkannya Gaji Non ASN dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN/Non ASN yang tepat waktu	14 Dokumen
4.	Diterbitkannya SPM Tepat Waktu	Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu	300 Dokumen
5.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Laporan
6.	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket
7.	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket
8.	Terkoordinasinya Pelaksanaan Organisasi di Tingkat Provinsi Kabupaten/kota	Jumlah PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi	14 Kab/Kota
9.	Tersusunnya Dokumen Proses proses Bisnis dan standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Proses Bisnis dan SOP Biro Organisasi	2 Laporan
10.	Tersusunnya Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	1 Laporan
11.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
12.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
13.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
14.	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi	3 Dokumen
15.	Teradministrasinya Surat Masuk dan Surat Keluar	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Teradministrasi	100%
16.	Tertatanya dan Tersimpannya Arsip	Persentase Arsip yang tertata sesuai ketentuan	100%
17.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	22 Unit
18.	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit

Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

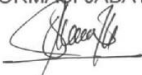
Anggaran

Rp. 20.886.000,-
Rp. 410.490.000,-
Rp. 0,-
Rp. 4.795.000,-
Rp. 78.168.050,-

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 11.887.950,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 164.566.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 13.673.450,-
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 0,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 214.115.000,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 27.890.000,-

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN
FORMASI JABATAN



Dr. SULAEHA, MM
Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



MARYANI SUNI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19700309 199503 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BAGIAN EVALUASI JABATAN DAN KOMPETENSI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSYANI, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI JABATAN
KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. SULAEHA, MM**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KE DUA

Dr. SULAEHA, MM
Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

ROSYANI, SE
Penata Tingkat II

NIP. 19760414 200211 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terfasilitasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah yang tersusun	40 Perangkat Daerah
2.	Tervalidasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural perangkat daerah	Jumlah Jabatan SKJ yang Mendapat Rekomendasi	1 Dokumen
3.	Terfasilitasinya dokumen Evaluasi Jabatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	40 Perangkat Daerah
4.	Tervalidasinya Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan yang Tervalidasi	1 Dokumen

Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Anggaran

Rp. 156.966.850,-

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



Dr. SULAEHA, SP,MM

Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI JABATAN DAN KOMPETENSI JABATAN



ROSYANI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19760414 200211 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PLT. KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ANSHAR H. MAUMBU, S.STP, MM**
Jabatan : **Plt.KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dr. SULAEGA, MM
Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD ANSHAR H. MAUMBU, S.STP, MM
Penata Tingkat I

NIP. 19911020 201206 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terverifikasinya Dokumen Usulan Formasi Jabatan Fungsional dari Perangkat Daerah	Persentase Usulan Permohonan Jabatan Fungsional yang terverifikasi	100%
2.	Terfasilitasinya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang difasilitasi	40 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Rp. 156.966.850,-

KEPALA BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



Dr. SULAEHA, SP,MM
Pembina

NIP. 19720502 200701 2 016

KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN



MUHAMMAD ANSHAR H. MA'UMBU, S.STP,MM
Penata Muda Tingkat I

NIP.19880823 201503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dra. FITRIANA LARATU, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **NENG ELLY, SH. MM**
J a b a t a n : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1973001 199503 2 002

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA


Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dimensi Struktur	78
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang Terevaluasi Kelembagaannya	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Rencana Aksi RB General Perangkat Daerah dengan Kategori Baik	100 %

Kegiatan

- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Anggaran

Rp. 262.073.400,-

KEPALA BIRO ORGANISASI


NENG ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI


Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUCHLIS ABD. LATIF, SH

J a b a t a n : KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Dra. FITRIANA LARATU, M.Si

J a b a t a n : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

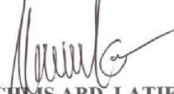
PIHAK KEDUA



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA



MUCHLIS ABD. LATIF, SH
Penata
NIP. 19880823 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbitnya Dokumen Penataan Kelembagaan Kab/ Kota	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota yang terbitkan	100%
2.	Terevaluasinya Kelembagaan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks kematangan Kategori Sedang	3 Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

Rp. 87.918.300,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA



MUCHLIS ABD. LATIF, SH
Penata
NIP. 19880823 201503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FENTI INDAH WATY, SH**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. FITRIANA LARATU, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI
BIROKRASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

FENTI INDAH WATY, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19770515 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan Provinsi	1 Laporan
2.	Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

Rp. 86.396.950,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI



FENTI INDAHWATY, SH
Penata
NIP. 19770515 200904 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PLT. KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL AZIZ DG MATANTU, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. FITRIANA LARATU, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

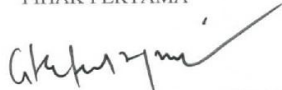
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA


ABDUL AZIZ DG MATANTU, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19860413 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbinanya Perangkat Daerah pada Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	40 Perangkat Daerah
2.	Termonitoringnya Pelaksanaan Rencana Aksi RB Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	40 Perangkat Daerah
3.	Tersusunnya Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	40 Rekomendasi
4.	Terbinanya Kab/Kota dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina pelaksanaan reformasi birokrasinya	2 Kab/Kota

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rp. 87.758.150,-

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
DAN REFORMASI BIROKRASI



Dra. FITRIANA LARATU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 198811 2 002

KEPALA SUB BAGIAN
REFORMASI BIROKRASI



ABDUL AZIZ DG MATANTU SIP, M.Si
Pembina
NIP. 19860413 200701 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LINDAYANI, SH, MAP**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NENG ELLY, SH. MAP**
Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

NENG ELEY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah daerah	- Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah yang memenuhi 7 Informasi - Persentase Indiator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	85 % 100 %
2.	Meningkatnya Penerapan sistem kerja baru pada Perangkat daerah	- Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kerja baru - Persentase Perangkat Daerah yang telah menyesuaikan Prodis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru	85 % 85 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Kab/Kota	- Persentase kab/kota Yang Terbina Pelayanan Publiknya	100 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	- Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mandiri Kategori BAIK - Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan Nilai IKM Baik	60 % 100 %
5.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Atas	Persentase unit lokus evaluasi (ULE) Provinsi dengan nilai kepatuhan zona hijau	100 %
6.	Meningkatnya Implementasi Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi budaya kerja Ber AKHLAK kategori Sehat	100 %

Kegiatan

Anggaran

- Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Rp. 253.930.800,-

KEPALA BIRO ORGANISASI



NENG'ELLY, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002

KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

LINDAYANI, SH. MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **FARIDA H.PALENGA, S. KOM, MAP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **LINDAYANI, SH, MAP**
J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

LINDAYANI, SH, MAP

Pembina

NIP. 19860413 200701 1 001

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

FARIDA H.PALENGA, S.KOM, MAP

Penata Tingkat I

NIP. 19860108 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya LKIP Pemda	Jumlah LKIP Pemda yang tersusun	1 Dokumen
2.	Terverifikasinya LKIP Perangkat Daerah	Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	48 Perangkat Daerah
3.	Terbinanya SAKIP Kab/Kota Komponen Pelaporan Kinerja	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait pelaporan kinerja	3 Kab/Kota
4.	Tersusunnya IKU dan Perjanjian Kinerja Pemda	Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja pemda	2 Dokumen
5.	Terverifikasinya IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	48 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Rp. 80.079.050,-

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK



LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

KEPALA SUB BAGIAN
AKUNTABILITAS KINERJA



FARIDA H. PALENGA, S. KOM, MAP
Penata Tingkat I
NIP. 19860108 201001 2 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **AMIRUDDIN LATUCONSINA, S. Sos**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KERJA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **LINDAYANI, SH, MAP**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 18 September 2025

PIHAK KEDUA

LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

PIHAK PERTAMA

AMIRUDDIN LATUCONSINA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19760607 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Budaya Kerja

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pembinaan Sistem Kerja baru pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	40 Perangkat Daerah
2.	Tersusunnya Dokumen Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Probis dan SOP Perangkat Daerah yang Tersusun	40 Dokumen
3.	Terinternalisasinya Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi Budaya Kerjanya kategori SEHAT	40 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
- Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Anggaran

Rp. 22.520.200,-
Rp. 62.473.550,-

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK



LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA
DAN BUDAYA KERJA



AMIRUDDIN LATUCONSINA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19760607 201101 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NURAINI, S.STP, M.Si**

J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **LINDAYANI, SH, MAP**

J a b a t a n : **KEPALA BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

LINDAYANI, SH, MAP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730216 199603 2 003

Palu, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

NURAINI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19861101 200412 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terbinanya Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina Pelayanan Publiknya	50 Perangkat Daerah
2.	Terimplementasinya Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Standar Pelayanannya	50 Perangkat Daerah
3.	Terbinanya Perangkat Daerah dalam implementasi SKM Online	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara online	2 Perangkat Daerah Piloting
4.	Terbinanya Kab/Kota terkait Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Kab/Kota yang dibina Pelayanan Publiknya untuk persiapan evaluasi	13 Kab/kota
5.	Terdampungnya Perangkat Daerah Lokus Evaluasi dalam Kepatuhan atas Pelaksanaan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi yang didampingi dalam Pelaksanaan Kepatuhan Pelayanan Publik	5 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Anggaran

- Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

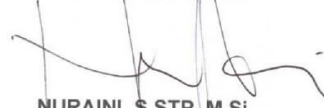
Rp. 88.858.000,-

KEPALA BAGIAN KINERJA
DAN PELAYANAN PUBLIK



LINDAYANI, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730216 199603 2 003

KEPALA SUB BAGIAN
PELAYANAN PUBLIK



NURAINI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19861101 200412 2 002